

Studi Pendahuluan Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung

Preliminary Study of Accounting Application at The Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bandar Lampung

Rusmianto¹⁾

¹⁾Staf Pengajar pada Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi Dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung

Abstract

This study wanted to know how the application of accounting at the micro small and medium enterprises (MSMEs), especially MSMEs in the town of Bandar Lampung as a first step in establishing research and development activities are appropriate at a time when that will come. The variables that will be seen as the application of accounting in MSMEs are: recording system and reporting for financial transactions, knowledge of micro small and medium businesses (MSMEs) on accounting, knowledge of micro small and medium businesses (MSMEs) about the tax, the use of information technology in business, and business decision-making system. The conclusion that can be generated from research that uses 55 micro small medium enterprises (MSMEs) as a sample of the research are: the micro small and medium businesses (MSMEs), most have not been doing the accounting process as a recording system that produces financial reports. The small micro business medium enterprises (MSMEs) have sufficient knowledge about the concept - general concepts of accounting but does not have sufficient knowledge about accounting process itself. Most of the small and medium businesses (MSMEs) do not have enough knowledge about taxation. the majority of the perpetrators of small and medium enterprises (MSMEs) are not applying information technology in their business field. Most of the small and medium businesses (MSMEs) make operational decisions with a rational business but still make plans only limited in memory just is not translated in the form of documents.

Keywords: Accounting Application, Micro Small and Medium Enterprises

Pendahuluan

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menyatakan bahwa untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakan pembangunan dalam jangka panjang adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif. Perwujudan kebijakan ini dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM. Selain itu, dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menunjukkan makin kuatnya posisi UMKM dalam kebijakan pembangunan nasional. UMKM di Indonesia juga merupakan barometer dari kesehatan ekonomi suatu negara. UMKM di Indonesia telah menunjukkan perannya dalam

penciptaan atau pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi UMKM di Indonesia pada tahun 2008 merupakan 99,9% dari pelaku usaha nasional dengan kontribusi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebanyak 52% dari total sektor usaha, seperti tampak pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Menurut Skala Usaha

No	Skala Usaha	Jumlah (Unit)		Perkembangan	
		2007	2008	Jumlah	(%)
1	Usaha mikro	49.287.276	50.697.659	1.410.383	2,86
2	Usaha kecil	498.565	520.221	21.656	4,34
3	Usaha menengah	38.282	39.657	1.375	3,59
4	Usaha besar	4.463	4.372	(91)	(2,04)
	Jumlah	49.828.586	51.261.909	1.433.323	2,88

Sumber : Kementerian Kop dan UKM, 2009

Tabel 2. Perkembangan Jumlah UMKM menurut sektor ekonomi

No	Skala Usaha	Jumlah (Unit)		Perkembangan	
		2007	2008	Jumlah	(%)
1	Pertanian	26.383.268	26.400.869	17.601	0,07
2	Pertambangan	263.250	261.341	(1.909)	(0,73)
3	Industri pengolahan	3.179.143	3.238.111	58.968	1,85
4	Listrik, gas, air	11.537	11.622	85	0,74
5	Bangunan	167.640	174.359	6.719	4,01
6	Perdagangan, hotel, rest	14.012.134	14.789.950	777.816	5,55
7	Pengangkutan dan kom	2.774.573	3.205.025	430.452	15,51
8	Keuangan, persewaan	928.713	997.511	68.798	7,41
9	Jasa-jasa	2.103.865	2.178.749	74.884	3,56
	JUMLAH	49.824.123	51.257.537	1.433.414	2,88

Sumber : Kementerian Kop dan UKM, 2009

Berdasarkan penelitian *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation* (HSBC) pada Tahun 2007 (Rahmana, 2009) UMKM di Indonesia sangat optimis untuk terus dikembangkan karena sekitar 64% pengusaha UMKM di Indonesia mempunyai niat untuk menambah investasi pengembangan bisnis. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 44% pengusaha UMKM di Indonesia mempunyai rencana untuk menambah tenaga kerja.

Namun untuk menghadapi krisis ekonomi global dan perdagangan bebas multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan *ASEAN Economic Community* (AEC), UMKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. UMKM harus mulai belajar dan beroperasi secara rasional dengan

menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang efisien dan efektif. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan praktik akuntansi yang sehat sebagai salah satu sumber informasi bisnis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi akuntansi yang akurat dan tepat mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain: keputusan pengembangan pasar, penetapan biaya produksi, penetapan harga, penetapan pajak, pengendalian aset, pengendalian kewajiban dan modal, serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur (Bank). Banyak UMKM yang pengajuan kredit atau subsidiya ditolak karena usahanya tidak memiliki pencatatan dan pembukuan yang jelas.

Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 dan dalam Undang-undang perpajakan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan akuntansi bagi UMKM. Melihat begitu banyak peranan dan manfaat informasi akuntansi dalam menciptakan arus informasi keuangan guna menunjang kelangsungan hidup (*going concern*) industri UMKM dan begitu pentingnya posisi UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka penting dilakukan penelitian yang fokus pada penerapan akuntansi bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada UMKM terutama di Kota Bandar Lampung sebagai langkah awal dalam menetapkan aktivitas penelitian dan pembinaan yang tepat di waktu yang akan datang.

Metode Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah semua UMKM yang berada di Kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan sentra industri yang banyak jumlahnya dan cukup berpotensi, sehingga penelitian di wilayah ini diharapkan dapat mewakili gambaran UMKM. Berdasarkan data pada tahun 2008 tercatat 12.333 UMKM yang tersebar di 5 kecamatan dan 9 kelurahan (Diskoperindag, 2008). Sampel penelitian dipilih secara random sebanyak 50 UMKM. Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui survei dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif. Variabel-variabel yang akan dilihat sebagai penerapan akuntansi pada UMKM adalah variabel sistem pencatatan dan pelaporan transaksi

keuangan, pengetahuan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentang akuntansi, pengetahuan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentang pajak, penggunaan teknologi informasi dalam bisnis, dan sistem pengambilan keputusan bisnis.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir (Harahap, 2005). Proses akuntansi menurut adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka di-input ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Indikator-indikator sering digunakan oleh peneliti untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan adalah: adanya pengarsipan dan pencatatan transaksi yang terjadi, adanya laporan yang dibuat secara berkala, adanya pembuatan dan pengarsipan utang piutang, adanya pembuatan dan pengarsipan kas masuk dan kas keluar, adanya orang yang bertanggung jawab terhadap pencatatan. Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 6 pertanyaan yang berkenaan dengan penerapan indikator.

Pengetahuan pelaku UMKM tentang akuntansi

Indikator pengetahuan akuntansi menggunakan dua dimensi pengukuran yang biasanya digunakan dalam kajian audit yaitu:

1. Pengetahuan deklaratif, merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan berdasarkan konsep, contohnya: kas adalah bagian dari *current assets*; pengetahuan ini memudahkan dalam analisis rasio yang biasanya tergantung dari instruksi yang ada.
2. Pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan yang konsisten dengan aturan-aturan atau standar akuntansi yang berlaku (Bonner dan Walker, 1994), biasanya tergantung pada pengalaman.

Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan yang berkenaan dengan pengetahuan deklaratif dan 2 pertanyaan untuk pengetahuan prosedural.

Pengetahuan pelaku UMKM tentang perpajakan

Pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan dari pimpinan atau pemilik usaha tentang perpajakan. Indikator pengetahuan pajak menggunakan dua dimensi pengukuran yang biasanya digunakan dalam kajian audit (Spliker, 1995; Bonner dan Walker, 1994), yaitu:

1. Pengetahuan deklaratif, merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan berdasarkan konsep, contohnya: pajak yang berkenaan dengan gaji seseorang adalah pajak pph pasal 21. Pengetahuan ini memudahkan dalam analisis rasio yang biasanya tergantung dari instruksi yang ada.
2. Pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan yang konsisten dengan aturan-aturan atau

peraturan perpajakan yang berlaku yang berlaku (Bonner dan Walker, 1994; Spilker, 1995)., biasanya tergantung pada pengalaman.

Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan yang berkenaan dengan pengetahuan deklaratif dan 2 pertanyaan untuk pengetahuan prosedural.

Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan yang berkenaan dengan penerapan indikator teknologi informasi.

Sistem Pengambilan Keputusan Bisnis

Informasi akuntansi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai informasi statutori, informasi anggaran dan informasi tambahan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar di dalam membuat keputusan. Indikator variabel penggunaan informasi akuntansi terdiri dari 3, yaitu:

1. Informasi statutori, merupakan informasi akuntansi yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi dan Arus Kas.
2. Informasi anggaran, merupakan informasi akuntansi yang terdiri dari informasi proyeksi Laba Rugi dan proyeksi Arus Kas.
3. Informasi tambahan, terdiri dari informasi laporan Harga Pokok Produksi dan Rasio Keuangan (Holmes dan Nicholls, 1989).

Variabel ini diukur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan yang berkenaan dengan pengambilan keputusan bisnis.

Penelitian deskriptif ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah alat yang digunakan untuk menyajikan data agar lebih informatif berupa nilai tengah dan ukuran sebaran.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Responden

Tim peneliti telah mendistribusikan instrumen penelitian sebanyak 55 kepada para subyek penelitian. Seluruh subyek yang terlibat adalah para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terpilih yang ada di Bandar Lampung. Tabel 3 berikut menunjukkan distribusi per kecamatan dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terlibat dalam penelitian ini. Gambaran secara umum responden ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Daftar Sampel Penelitian per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah
Rajabasa	20
Sukarame	12
Kedaton	11
Kemiling	7
Tanjungkarang Pusat	4
Tanjung Karang Timur	1
Total	55

Tabel 4. Statistik Deskriptif Responden

Keterangan	Jumlah	%	
Bentuk Kepemilikan	Pribadi	44	80
	Kerjasama	11	20
Pendidikan	s.d. SMA	32	58
	Diploma	7	13
	Sarjana	16	29
Periode Usaha	< 5 Tahun	19	35
	5 – 10 Tahun	23	42
	> 10 Tahun	13	24
Legalitas	Ada	35	64
	Dalam Proses	6	11
	Tidak Ada	14	25
Jumlah Karyawan	< 5 Orang	39	71
	5 S.D. 20 Orang	15	27
	> 20 Orang	1	2
Penjualan Per Hari	< 900.000	29	53
	< 7.000.000	21	38
	> 7.000.000	5	9
Area Pemasaran	Lokal	51	93
	Nasional	4	7

Tabel 4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penjualan per hari dapat disimpulkan bahwa 29 (53%) responden merupakan usaha mikro, 21 (38%) responden merupakan usaha kecil, 5 (9%) responden merupakan usaha menengah. Periode usaha yang telah dijalankan 19 (35%) responden kurang dari 5 tahun, 23 (42%) responden 5 – 10 tahun, 13(24%) responden lebih dari 10

tahun. 35 (64) responden telah memiliki izin usaha, 6 (11%) masih dalam proses, dan 14 (24%) belum memiliki izin usaha.

Variabel sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan

Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka dimasukkan ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan keluaran berupa informasi laporan keuangan. Indikator-indikator sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan adalah: adanya pengarsipan dan pencatatan transaksi yang terjadi, adanya laporan yang dibuat secara berkala, adanya pembuatan dan pengarsipan utang piutang, adanya pembuatan dan pengarsipan kas masuk dan kas keluar, adanya orang yang bertanggung jawab terhadap pencatatan.

Sebagian besar (73%) pelaku UMKM telah memisahkan harta usahanya dengan harta pribadi dan sebanyak 27% belum melakukan pemisahan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menyadari pentingnya konsep pemisahan harta ini dalam suatu usaha sehingga perkembangan kinerja suatu usaha dapat dilihat secara objektif. Pemisahan ini juga merupakan asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam proses penerapan akuntansi.

Para pelaku UMKM (51%) telah membuat bukti transaksi penerimaan kas, penjualan, piutang, pengeluaran kas, pembelian, utang. Terdapat 49% pelaku UMKM belum melakukan hal ini. Hal yang dapat dipetik dari hasil ini adalah pengetahuan para pelaku UMKM tentang pentingnya bukti transaksi yang merupakan dasar untuk menganalisis dan mencatat transaksi keuangan belum merata untuk semua pelaku UMKM.

Sebagian besar (72%) para pelaku UMKM telah melakukan pencatatan terhadap kas masuk - kas keluar dan hutang - piutang sedangkan 28 % belum melakukan hal ini. Hasil ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sebagian besar telah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi walaupun terbatas pada informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Sebanyak 70% pelaku UMKM tidak membuat laporan laba-rugi secara periodik dan hanya 30% yang melakukan hal ini. Hasil ini sejalan dengan banyaknya para pelaku UMKM telah mempekerjakan karyawan sebagai tenaga pembukuan yaitu sebesar 28% dan 72% pelaku UMKM tidak memiliki karyawan bagian pembukuan. Hasil ini sejalan juga dengan banyaknya para pelaku UMKM yang menggunakan jasa akuntan untuk memeriksa laporan keuangan yang hanya sebesar 12%. Hal yang dapat dipetik dari hasil ini adalah para pelaku usaha UMKM sebagian besar belum melakukan proses akuntansi sebagai suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan.

Pengetahuan pelaku UMKM tentang akuntansi

Teori rasional dalam mendefinisikan pengetahuan akuntansi umumnya digunakan untuk mengetahui tingkar pengetahuan akuntansi. Pengetahuan akuntansi adalah pengetahuan dari pimpinan atau pemilik usaha tentang akuntansi. Indikator pengetahuan akuntansi menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu pengetahuan deklaratif dan Pengetahuan prosedural.

Sebanyak 70% pelaku UMKM mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang konsep-konsep umum akuntansi (pengetahuan deklaratif) dan hanya 29% para pelaku usaha UMKM yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan prosedural. Berdasarkan kondisi ini dapat dilihat bahwa para pelaku UMKM memiliki cukup pengetahuan tentang konsep-konsep umum akuntansi tetapi tidak memiliki cukup pengetahuan tentang proses akuntansi itu sendiri.

Pengetahuan pelaku UMKM tentang perpajakan

Pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan dari pimpinan atau pemilik usaha tentang perpajakan. Indikator pengetahuan pajak menggunakan dua dimensi pengukuran Pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Sebanyak 70% pelaku UMKM tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sebagian besar tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perpajakan.

Penggunaan teknologi informasi dalam b.isnis

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sebagian besar pelaku UMKM belum mengaplikasikan teknologi informasi dalam bisnis yang mereka tekuni. Hal ini tercermin dari 91% pelaku UMKM yang memiliki komputer kurang dari 5 atau bahkan tidak memiliki komputer sama sekali dan belum terhubung dengan sambungan internet. Sebanyak 84% pelaku UMKM belum mempunyai *software* akuntansi dan 89% belum menggunakan internet sebagai sarana pemasaran produk.

Sistem pengambilan keputusan bisnis

Informasi akuntansi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai informasi statutori, informasi anggaran dan informasi tambahan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang digunakan

sebagai dasar di dalam membuat keputusan. Sebanyak 58% pelaku UMKM melakukan pengambilan keputusan operasional bisnis dengan rasional. Hal ini tercermin dari 60% pelaku UMKM telah memiliki anggaran penjualan, 55% anggaran laba dan 71% telah mengetahui harga pokok dari produk dan jasa yang mereka jual. Satu hal yang belum mereka lakukan adalah rendahnya akses pembiayaan terhadap perbankan yaitu sebesar 40% pelaku UMKM.

Hasil dari dimensi sistem pengambilan keputusan ini cukup bertentangan dengan hasil dari dimensi sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang memberikan informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi sebagai suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan. Hal yang dapat dipetik dari hasil ini adalah sebagian besar pelaku UMKM masih membuat perencanaan hanya sebatas dalam ingatan saja belum diterjemahkan dalam bentuk dokumen.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan proses akuntansi sebagai suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan.
2. Para pelaku UMKM memiliki cukup pengetahuan tentang konsep-konsep umum akuntansi tetapi tidak memiliki cukup pengetahuan tentang proses akuntansi itu sendiri.
3. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perpajakan.
4. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengaplikasikan teknologi informasi dalam bisnis yang mereka tekuni.
5. Sebagian besar pelaku UMKM melakukan pengambilan keputusan operasional bisnis dengan rasional dan sebagian besar masih membuat perencanaan hanya sebatas dalam ingatan saja belum diterjemahkan dalam bentuk dokumen.

Daftar Pustaka

- Bonner, S.E and Walker, P.L., 1994, The Effects of Instruction and experience on The Acquisition of Auditing Knowledge, *The Accounting Review*, Vol.69. No. 1. 157- 178.
- FASB. 1986. *Accounting Standards: Statements of Financial Accounting* \concept, 1-6, McGraw-Hill Book Company.
- Holmes, S., and Nicholls, D..1989. An Analysis of The Use of Accounting Information by Australian Small Business, *Journal of Small Business Management*, 26 (20).57-68
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta
- Rahmana, Arif. 2009. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Proceeding, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*. Yogyakarta.

Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

Kementrian Koperasi Dan UKM. 2009. Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2008. Bagian Data –Biro Perencanaan Kementrian Koperasi Dan UKM. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Wichman, H., 1983, Accounting and Marketing Key Small Business Problem, American Journal of Small Business, Spring, Vol. VII, No. 4, 19-26.